Mohamad Sutisna | Efan Setiadi | Ramadhan Dwi Prasetyo
Sanusi | Wachid Pratomo | Susi Fitria Dewi

DEMOKRASI PANCASILA

BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Pendidikan, Transformasi Digital, Tantangan, dan Strategi Penguatan

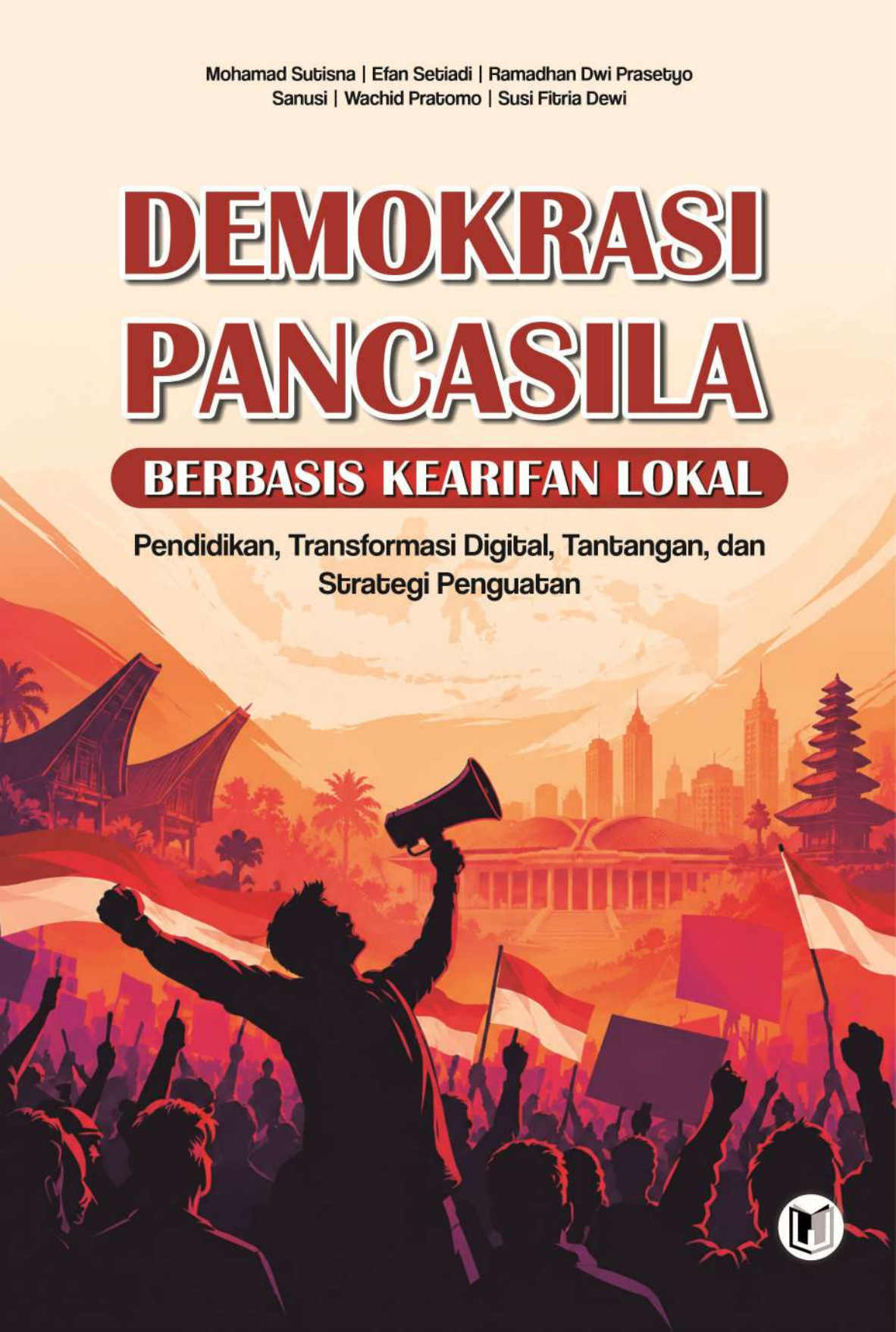

Mohamad Sutisna | Efan Setiadi | Ramadhan Dwi Prasetyo
Sanusi | Wachid Pratomo | Susi Fitria Dewi

DEMOKRASI PANCASILA

BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Pendidikan, Transformasi Digital, Tantangan, dan Strategi Penguatan

Penerbit widina

DEMOKRASI PANCASILA BERBASIS KEARIFAN LOKAL: PENDIDIKAN, TRANSFORMASI DIGITAL, TANTANGAN, DAN STRATEGI PENGUATAN

Tim Penulis:
Mohamad Sutisna, Efan Setiadi, Ramadhan Dwi Prasetyo Sanusi, Wachid Pratomo, Susi Fitria Dewi

Desain Cover:
Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Proofreader:
Aas Masruroh

ISBN:
978-634-317-540-7

Cetakan Pertama:
November, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul "Demokrasi Pancasila Berbasis Kearifan Lokal: Pendidikan, Transformasi Digital, Tantangan, dan Strategi Penguatan" dapat disusun sebagai salah satu kontribusi pemikiran dalam pengembangan demokrasi Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan kekayaan budaya bangsa. Demokrasi merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme politik yang berkaitan dengan pemilihan pemimpin, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kedaulatan rakyat, tetapi juga sebagai proses pembudayaan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, musyawarah, dan tanggung jawab bersama. Nilai-nilai tersebut memiliki keterkaitan erat dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam praktiknya, demokrasi Pancasila juga memperoleh kekuatan dari kearifan lokal yang tumbuh, berkembang, dan diwariskan dalam kehidupan masyarakat di berbagai wilayah Nusantara.

Kearifan lokal merupakan kekayaan sosial dan budaya yang mengandung nilai-nilai luhur, seperti gotong royong, musyawarah mufakat, toleransi, solidaritas, penghormatan terhadap perbedaan, serta penyelesaian konflik secara damai. Nilai-nilai tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam membangun kehidupan demokratis yang partisipatif, inklusif, dan berkeadaban. Oleh karena itu, pengintegrasian kearifan lokal ke dalam praktik demokrasi Pancasila menjadi langkah strategis untuk memperkuat identitas kebangsaan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk dan terus mengalami perubahan.

Di tengah perkembangan zaman, demokrasi Pancasila berbasis kearifan lokal menghadapi berbagai tantangan. Globalisasi, perubahan pola interaksi sosial, berkembangnya individualisme, polarisasi masyarakat, penyebaran disinformasi, serta transformasi digital telah memengaruhi cara masyarakat memahami dan mempraktikkan demokrasi. Ruang digital membuka peluang yang luas bagi partisipasi warga negara, pertukaran gagasan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun, pada saat yang sama, ruang tersebut juga dapat menjadi sarana penyebaran ujaran kebencian, manipulasi informasi, intoleransi, dan konflik sosial apabila tidak disertai literasi digital serta kesadaran etis yang memadai.

Dalam situasi tersebut, pendidikan memiliki peran fundamental dalam menanamkan dan mengembangkan budaya demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal.

Pendidikan tidak cukup hanya memberikan pemahaman konseptual mengenai demokrasi, tetapi juga perlu membentuk karakter warga negara yang kritis, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, mampu berdialog, dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal, nilai-nilai demokrasi dapat diinternalisasikan menjadi sikap dan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun ruang digital.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara demokrasi Pancasila dan kearifan lokal, peran pendidikan dalam penguatan budaya demokrasi, dinamika transformasi digital, berbagai tantangan yang dihadapi, serta strategi penguatan demokrasi yang relevan dengan perkembangan masyarakat kontemporer. Pembahasan dalam buku ini diharapkan dapat mempertemukan perspektif filosofis, sosial, budaya, pendidikan, dan kewarganegaraan sehingga demokrasi tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai praktik kehidupan yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa.

Lebih jauh, buku ini menekankan pentingnya mengembangkan demokrasi yang tidak tercerabut dari akar budaya masyarakat, tetapi tetap terbuka terhadap inovasi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan kemajuan teknologi. Kearifan lokal perlu dipahami secara kritis dan kontekstual, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, kesetaraan, keadilan, dan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Dengan demikian, tradisi lokal dapat menjadi sumber inspirasi bagi penguatan demokrasi tanpa mengabaikan tuntutan keadilan dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara.

Strategi penguatan demokrasi Pancasila berbasis kearifan lokal memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, generasi muda, serta masyarakat luas. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk membangun ekosistem demokrasi yang mendorong partisipasi bermakna, memperkuat dialog lintas budaya, meningkatkan literasi kewarganegaraan dan digital, serta menghidupkan kembali praktik musyawarah dan gotong royong dalam menghadapi persoalan bersama. Upaya ini menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan yang menjadi karakter kehidupan bangsa Indonesia.

Penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, guru, peneliti, praktisi pendidikan, pengambil kebijakan, pemerhati demokrasi, serta masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap pengembangan demokrasi dan pendidikan kewarganegaraan. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam kegiatan pembelajaran, penelitian, diskusi akademik, dan perumusan strategi penguatan demokrasi Pancasila yang kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bagian dari proses penyempurnaan pemikiran dan pengembangan kajian demokrasi Pancasila berbasis kearifan lokal pada masa mendatang. Akhir kata, semoga kehadiran buku ini dapat memperkaya khazanah keilmuan, memperkuat kesadaran demokratis, dan menginspirasi berbagai pihak untuk mengembangkan kehidupan demokrasi yang berkarakter, berkeadaban, inklusif, serta berakar pada nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal. Semoga demokrasi Indonesia senantiasa tumbuh sebagai ruang bersama yang menjunjung tinggi martabat manusia, menghormati keberagaman, mengedepankan musyawarah, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, Oktober 2026
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **vi**
BAB I PERAN PENDIDIKAN DALAM PENGUATAN DEMOKRASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL **1**
A. Integrasi Nilai-Nilai Fundamental Dalam Pendidikan Kewarganegaraan 1
B. Demokrasi Sebagai Budaya dan Cara Hidup 3
C. Hubungan Pendidikan Kewarganegaraan dan Demokrasi 6
D. Peran PKN Dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi 8
E. Internalisasi Nilai Lokal di Sekolah Sebagai Peran Pendidikan Dalam Penguatan Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal 11
F. Peran Guru dan Lembaga Pendidikan Dalam Penguatan Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal 24
G. Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal 26
BAB II TANTANGAN DEMOKRASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL **31**
A. Globalisasi dan Erosi Nilai Lokal 31
B. Individualisme dan Pragmatisme Politik 37
C. Ketimpangan Sosial dan Ketidakadilan 38
D. Lemahnya Regenerasi Budaya 41
BAB III DEMOKRASI DIGITAL DAN KEARIFAN LOKAL **47**
A. Media Sosial dan Partisipasi Politik 49
B. Ciri-ciri Demokrasi Lokal 51
C. Ancaman Disinformasi dan Polarisasi 54
D. Adaptasi Nilai Lokal di Era Digital 57
BAB IV DEMOKRASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN PEMBANGUNAN NASIONAL **61**
A. Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal 61
B. Demokrasi dan Pembangunan Berkelanjutan 64
C. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 67
D. Kearifan Lokal Sebagai Modal Pembangunan 71
E. Sinergi Pemerintah dan Masyarakat 75
BAB V STRATEGI PENGUATAN DEMOKRASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL **79**
A. Revitalisasi Nilai dan Tradisi Lokal 80
B. Integrasi Demokrasi Lokal dan Sistem Nasional 87
C. Peran Negara, Masyarakat, dan Generasi Muda 95

D. Rekomendasi Kebijakan Publik 98
BAB VI REFLEKSI DEMOKRASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL 105
A. Refleksi Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal 105
B. Implikasi Bagi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 109
C. Harapan dan Arah Pengembangan Demokrasi Indonesia 113
DAFTAR PUSTAKA 119
GLOSARIUM 131
PROFIL PENULIS 137

BAB I

PERAN PENDIDIKAN DALAM PENGUATAN DEMOKRASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL

A. INTEGRASI NILAI-NILAI FUNDAMENTAL DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem pendidikan nasional yang berfungsi membentuk warga negara yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. PKn tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan sikap, nilai, dan keterampilan kewarganegaraan. Secara konseptual, PKn bertujuan untuk mengembangkan warga negara yang memiliki kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*), yaitu kemampuan memahami hak dan kewajiban, berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat, serta memiliki komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Winataputra yang menyatakan bahwa PKn merupakan pendidikan yang diarahkan untuk membentuk warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis (Winataputra, 2012).

Dalam praktiknya, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya menyampaikan konsep-konsep normatif, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai Pancasila, nilai konstitusi (UUD 1945), dan nilai kebhinekaan. Ketiganya saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam membangun karakter warga negara.

1. Nilai Pancasila sebagai Dasar Ideologi Negara. Pancasila merupakan dasar ideologi negara yang menjadi sumber dari segala nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks PKn, Pancasila tidak hanya diajarkan sebagai hafalan lima sila, tetapi sebagai pedoman hidup yang harus di internalisasi dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai yang bersifat

BAB II

TANTANGAN DEMOKRASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL

A. GLOBALISASI DAN EROSI NILAI LOKAL

Globalisasi melalui berbagai media informatika yang semakin canggih (seperti TV, satelit, seluler, dan internet), menyebabkan berbagai pesan, kreasi, peristiwa, tontonan, dan pikiran merebak dengan cepat, melalui proses digitalisasi. Sayangnya, proses globalisasi yang berjalan sepihak ini melanda masyarakat Indonesia dan masyarakat negara berkembang pada umumnya. Kita tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa masyarakat di pedesaan Indonesia pun sebagian telah mengalami proses internasionalisasi. Untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan berkembang dengan cepat serta tidak terbayangkan sebelumnya, diperlukan ide-ide segar yang dikembangkan dalam konteks kultural Indonesia. Dalam era globalisasi dewasa ini, tidaklah mungkin suatu negara hidup dan membangun kemajuan dalam posisi mengisolasi diri. Pengaruh antarnegara lewat teknologi informasi, teknologi industri, perdagangan uang, dan perdagangan komoditas antarbangsa merupakan kenyataan. Suka tidak suka kita harus hidup dengan kondisi seperti itu sekarang ini.

1. Menghadapi Globalisasi Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, globalisasi mengandung makna bahwa semua hambatan pada transaksi perdagangan barang maupun jasa, pergerakan manusia dan investasi antar negara secara bertahap akan dikurangi, bahkan dalam jangka waktu tertentu akan dihapuskan. Globalisasi ekonomi adalah proses liberalisasi ekonomi dalam skala mondial (berkaitan dengan seluruh dunia) sehingga menyebabkan barang dan jasa bebas masuk dan keluar antarnegara tanpa rintangan, baik yang bersifat tarif maupun nontarif.

BAB III

DEMOKRASI DIGITAL DAN KEARIFAN LOKAL

Transformasi digital dalam dua dekade terakhir tidak sekadar menghadirkan perubahan teknologis, tetapi telah merombak secara mendasar lanskap demokrasi global, termasuk di Indonesia. Demokrasi yang dahulu bertumpu pada ruang-ruang fisik seperti forum warga, rapat umum, dan media konvensional kini beralih ke ruang digital yang serba cepat, cair, dan tanpa batas geografis. Kehadiran internet serta platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan TikTok telah mentransformasi cara warga negara mengakses informasi, membentuk opini, hingga berpartisipasi dalam proses politik.

Namun, transformasi ini tidak bersifat netral. Ia membawa konsekuensi struktural terhadap cara demokrasi bekerja. Jika dahulu partisipasi politik membutuhkan biaya tinggi akses informasi terbatas, keterbatasan ruang komunikasi, serta dominasi elite kini hambatan tersebut runtuh. Siapa pun dapat menjadi produsen informasi, bukan sekadar konsumen. Akan tetapi, di sinilah letak paradoks demokrasi digital: ketika semua orang bisa berbicara, siapa yang benar-benar didengar? Ketika semua informasi tersedia, mana yang dapat dipercaya?

Data menunjukkan betapa masifnya pergeseran ini. Laporan We Are Social (2024) mencatat bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah melampaui 210 juta jiwa, dengan penetrasi media sosial lebih dari 75% populasi. Rata-rata waktu penggunaan internet mencapai lebih dari 7 jam per hari, dengan hampir 3 jam dihabiskan khusus untuk media sosial. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat keterlibatan digital tertinggi di dunia. Ruang publik tidak lagi didominasi oleh parlemen atau media arus utama, melainkan oleh linimasa (timeline), trending topic, dan algoritma platform.

Dalam konteks ini, demokrasi Indonesia memasuki fase baru: demokrasi yang dimediasi algoritma. Preferensi politik warga tidak lagi hanya dibentuk oleh interaksi sosial langsung, tetapi juga oleh sistem rekomendasi berbasis

BAB IV

DEMOKRASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

A. DEMOKRASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Demokrasi berbasis kearifan lokal merupakan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya tradisional Indonesia dengan prinsip-prinsip demokrasi modern untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan (Junaidi, 2025). Indonesia, sebagai negara majemuk, menonjolkan daya tarik uniknya dibandingkan bangsa lain. Keberagaman bangsa ini yang cirinya khas dipengaruhi oleh karakteristik lokal yang diwariskan lintas generasi dari leluhur. Keberagaman semacam itu melahirkan kearifan lokal yang beragam, disesuaikan dengan unsur sosial, budaya, dan kondisi geografis. Kearifan lokal mewarnai identitas kebangsaan Indonesia. Tiap wilayah memberikan sumbangan dalam ranah Nasional. Keunikan keragaman budaya itu pun memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Konsep ini menekankan musyawarah mufakat, gotong royong, dan harmoni sosial sebagai fondasi yang memperkuat identitas bangsa (Hernandi, 2025).

Kearifan lokal adalah cara pandang, ilmu pengetahuan, dan beragam pendekatan hidup berbentuk kegiatan yang dilakukan komunitas lokal. Pengetahuan ini bertujuan menyelesaikan masalah demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari (Unayah & Sabarisman, 2016). Kearifan lokal memiliki nilai tinggi dan manfaat unik sebagai bagian integral dari pola hidup untuk mengurai segala tantangan eksistensial. Kearifan lokal merupakan ciri khas atau kepribadian budaya suatu bangsa yang membentuk identitas nasionalnya. Ia juga menjadi pelepas nilai-nilai budaya masyarakat lokal yang diwariskan turun-temurun antargenerasi (Ishami et al., 2025). Kearifan lokal yang kaya dan beragam ini memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional di Indonesia. Nilai-nilai turun-temurun tersebut dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan

BAB V

STRATEGI PENGUATAN DEMOKRASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Materi tentang strategi penguatan demokrasi berbasis kearifan lokal pada dasarnya menunjukkan bahwa demokrasi yang kokoh tidak cukup hanya dibangun melalui sistem politik modern. Demokrasi juga perlu ditopang oleh nilai-nilai budaya yang sudah lama hidup di tengah masyarakat. Karena itu, nilai seperti musyawarah, gotong royong, solidaritas sosial, dan kebersamaan perlu dihidupkan kembali, bukan sekadar dipertahankan sebagai warisan budaya, tetapi juga dijadikan dasar dalam praktik demokrasi sehari-hari. Dalam konteks ini, tradisi lokal memiliki peran yang cukup penting. Musyawarah adat, rembug desa, dan forum-forum komunitas misalnya, dapat menjadi ruang bersama bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi, lalu mengambil keputusan secara lebih partisipatif. Jadi, demokrasi tidak selalu harus dipahami dalam bentuk prosedur formal saja, tetapi juga bisa tumbuh dari kebiasaan sosial yang sudah akrab dengan kehidupan masyarakat.

Di sisi lain, peran tokoh adat, pemuka agama, dan tokoh masyarakat juga tidak bisa diabaikan. Mereka sering menjadi penghubung antara nilai budaya, kepentingan masyarakat, dan kehidupan sosial yang lebih luas. Kehadiran mereka penting, terutama untuk menjaga stabilitas sosial, membangun kepercayaan, serta menumbuhkan budaya demokrasi yang tidak hanya bebas, tetapi juga beretika. Agar tetap relevan, praktik demokrasi lokal tentu perlu dihubungkan dengan sistem demokrasi Nasional. Artinya, nilai-nilai kearifan lokal harus berjalan selaras dengan konstitusi, hukum nasional, dan tata kelola pemerintahan, khususnya di tingkat desa dan daerah. Dengan cara itu, demokrasi lokal tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian yang menguatkan demokrasi Nasional. Pada akhirnya, penguatan demokrasi berbasis kearifan lokal membutuhkan kerja bersama. Negara perlu menghadirkan kebijakan yang mendukung,

BAB VI

REFLEKSI DEMOKRASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL

A. REFLEKSI DEMOKRASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Demokrasi berbasis kearifan lokal pada dasarnya merupakan bentuk demokrasi yang tumbuh dari proses integrasi antara prinsip demokrasi modern dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai sistem politik formal yang ditandai oleh pemilihan umum, kompetisi partai politik, dan mekanisme perwakilan, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dalam keseharian masyarakat. Dalam perspektif ini, demokrasi merupakan bagian dari kebudayaan yang melekat pada cara hidup, cara mengambil keputusan, serta cara masyarakat membangun relasi sosial yang harmonis. (Mu'jizah, 2021). Dalam konteks Indonesia, refleksi terhadap demokrasi berbasis kearifan lokal menjadi sangat penting karena Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk, baik dari segi etnis, budaya, bahasa, maupun sistem nilai. Keberagaman ini melahirkan berbagai bentuk praktik demokrasi lokal yang sudah ada jauh sebelum konsep demokrasi modern diperkenalkan. Oleh karena itu, demokrasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari akar budaya masyarakatnya sendiri yang telah lama mengenal prinsip musyawarah, mufakat, gotong royong, serta penghormatan terhadap kolektivitas sosial (Indriani et al., 2024).

Secara teoritis, demokrasi berbasis kearifan lokal dapat dipahami sebagai bentuk demokrasi yang tidak bersifat universal dalam arti tunggal, tetapi bersifat kontekstual. Artinya, demokrasi selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, struktur sosial, serta sistem pengetahuan lokal yang berkembang dalam suatu masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan gagasan bahwa demokrasi tidak hanya produk politik Barat, tetapi juga dapat tumbuh dari pengalaman historis dan budaya masyarakat non-Barat, termasuk Indonesia (Jannah, 2025). Dalam praktiknya, refleksi demokrasi

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, A. R., Rosma Natasia, & Abdul Haliq. (2025). REVITALISASI TRADISI LISAN SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN BUDAYA LOKAL DI ERA MODERN. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *10*(5), 211–230. https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.26811

Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton: Princeton University Press.

Aini, A. N., & Wahidah, N. (2025). Revitalisasi Sastra Lokal dan Islami melalui Aplikasi Bercerita Digital Bilingual. *Jurnal Riset Ilmiah*, *4*(10), 2648–2669. https://doi.org/https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4656

Amirin, T. M. (2012). Implementasi pendekatan pendidikan multikultural kontekstual berbasis kearifan lokal di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, *1*(1).

Anderson, B. (2006). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso.

Antlov, H. (2003). Village government and rural development in Indonesia: The new democratic framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies, 39*(2), 193–214.

Antoni, M. R., & Brata, Y. R. (2020). Integration of Islamic Values and Local Knowledge in Social Practices for Environmental Conservation in Banjaranyar. *Jurnal JAMASAN*, *1*(2), 184–205. https://doi.org/https://doi.org/10.25157/jamasan.v1i2.5480

Anggraini, E., Roselani, N., Azhari, S., & Dora, N. (2025). Strategi Etnik Jawa Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Kearifan Lokal dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Sains Student Research*, *3*(2), 26–36. https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v3i2.3808

Appadurai, A. (1996). *Modernity at large: Cultural dimensions of globalization*. University of Minnesota Press.

Ariyadi, A., Hasan, A., & Muzainah, G. (2022). Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan di Kalimantan Tengah: Local Wisdom In Forest Management In Central Kalimantan. *Anterior Jurnal*, *21*(3), 11–16.

Arlis Prayugo. (2023), Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik. STIPAN

Armansyah, Y. (2017). Kontribusi seloko adat jambi dalam penguatan demokrasi lokal. *Sosial Budaya*, *14*(1), 1–13.

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners, 35*(4), 216–224.

Ariyadi, A., Hasan, A., & Muzainah, G. (2022). Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan di Kalimantan Tengah: Local Wisdom In Forest Management In Central Kalimantan. *Anterior Jurnal*, *21*(3), 11–16.

Armansyah, Y. (2017). Kontribusi seloko adat jambi dalam penguatan demokrasi lokal. *Sosial Budaya*, *14*(1), 1–13.

Azaim, M. (2026). Integrasi Ilmu Pengetahuan dan Tradisi dalam Perspektif Filsafat : Analisis Filsafat Tentang Kearifan Lokal dan Modernitas. *EDUSHOPIA: Journal of Progressive Pedagogy*, *3*(1), 32–48. https://doi.org/https://doi.org/10.64431/edushopia.v3i1.485

Babu, M. A., Wulandari, L. W., Susanto, D. R., & Ambarrukmo, P. (2024). Implementasi Kearifan Lokal Untuk Parawisata Berkelanjutan Di Desa Wisata Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan, rovinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Parawisata*, *7*(3), 34–42. ttps://doi.org/https://doi.org/10.23887/jmpp.v7i3.85444

Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. New Jersey: Prentice Hall.

Banks, J. A. (2008). *An Introduction to Multicultural Education*. Boston: Pearson.

Benu, E. D. N. A., Tabun, D. S. A. N., & Sabaat, Y. Y. (2025). Lopo sebagai Simbol Demokrasi Lokal pada Masyarakat Adat Atoin Pah Meto:(Studi Tentang Rumah Adat Lopo sebagai Simbol Demokrasi Lokal di Desa Saenam Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara). *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, *2*(4), 43–50.

Boulianne, S. (2015). Social media use and participation: A meta-analysis. *Information, Communication & Society*, 18(5), 524–538. https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1008542

Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Harvard University Press.

Budimansyah, D. (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.

Castells, M. (2012). *Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age*. Polity Press.

Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications.

Cogan, J. J., & Derricott, R. (2000). *Citizenship for the 21st century: An international perspective on education*. London: Kogan Page / Psychology Press.

Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press.

Dahl, R. A. (1998). *On Democracy*. New Haven: Yale University Press.

Dewey, J. (1916). *Democracy and Education*. New York: Macmillan.

Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan.

Diwyarthi, N. D. M. S., Citrawati, L. P., Kusumarini, I., Ariasri, N. R., & Darmiati, M. (2024). Kolaborasi Pentahelix Bagi Penguatan Peranan Perempuan Dalam Pengembangan Wisata Budaya Yang Berkelanjutan di Desa Taro. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *7*(1), 49–56. https://doi.org/https://doi.org/10.47767/sehati_abdimas.v7i1.905

Erfain. (2025). Kekuatan Komunitas Lokal Sebagai Pilar Masyarakat Sipil Program Studi Ilmu Pemerintahan , Universitas Sulawesi Tenggara. *Journal of Humanities, Social Sciences, And Education(JHUSE)*, *1*(6), 123–134. https://doi.org/https://doi.org/10.64690/jhuse.v1i6.308

Firdaus, M. (2022). Democracy making melalui musyawarah desa di Desa Bendungan Kecamatan Kaliwiro Wonosobo. *Jurnal Masyarakat dan Desa, 2*(2).

Fadhli, M., & Annisa, Y. (2024). Masyarakat Madani. *Jurnal Masyarakat Madan*, *9*(1), 117–134. https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.24014/jmm.v9i1.29265

Faizal. (2028). Diskursus Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan*, *1*(4), 35–51.

Fitriana, D., & Aidy, W. R. (2024). Pendekatan Kebudayaan dalam Membangun Ketahanan dan Keamanan Insani : Sebuah Kajian Strategis Cultural Approaches in Building Resilience and Human Security : A Strategic Study. *JURNAL KEAMANAN NASIONA*, *XPendekata*(2), 263–294. https://doi.org/https://doi.org/10.31599/2ay4k921

Fung, A., & Wright, E. O. (Eds.). (2003). *Deepening democracy: Institutional innovations in empowered participatory governance*. London: Verso.

Geertz, C. (1963). *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press.

Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. Basic Books.

Giddens, A. (1991). *Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age*. Stanford University Press.

Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24(1), 1–55.

Habermas, J. (1991). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. Cambridge, MA: The MIT Press.

Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press.

Han, B.-C. (2017). *In the swarm: Digital prospects*. MIT Press.

Hannerz, U. (1996). *Transnational Connections: Culture, People, Places*. Routledge.

Handini, N., Darwina, M., & Yudistira. (2025). Peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui inovasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. *Iah Nusantara (JINU)*, *2*(5), 964–986. https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5793

Harefa, S. V. (2025). Demokrasi desa dan peran kearifan lokal dalam partisipasi masyarakat. *Jurnal Pakehum*.

Hernandi, A. (2025). Perjalanan Spiritual Pancasila : Menyatu dalam Keberagaman dan Kebersamaan. *Jurnal Pembumian Pancasila*, *5*(1), 15–31. https://doi.org/https://doi.org/10.63758/jpp.v5i1.61

Huntington, S. P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.

IEA. (2001). *Civic Education Study*. International Association for the Evaluation of Educational Achievement.

Indriani, S., Natalia, T. S., Anzani, E., & Eduardo, H. (2024). Pemilukada Langsung Dalam Perspektif Demokrasi Lokal (Analisis Kritis Kompleksitas Permasalahannya). *Jurnal Hukum Tri Pantang*, *10*(1), 23–33.

Ishak, I., Marta, A., Hasanuddin, H., & Febrina, R. (2022). Hak-Hak Masyarakat Adat, Pengakuan dan Demokrasi: Pembelajaran dari Desa Pulau Sarak Kabupaten Kampar. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *21*(2), 161–168.

Ishami, N., Nurkhasanah, A., & Raudhatul, C. (2025). Menggali Nilai-Nilai Kearifan Lokal sebagai Identitas Budaya Riau. *Maharsi: Jurnal Pendiidikan Sejarah Dan Sosiologi*, *7*(2), 1–12. https://doi.org/https://doi.org/10.33503/maharsi.v7i2.1618

Indriyana Dwi Mustikarini, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Isharyanto. (2024). Buku Globalisasi dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia

Ismail, M. (2009). Pengembangan model pembelajaran IPS berbasis kearifan lokal masyarakat Sasak: ke arah sikap dan prilaku berdemokrasi siswa SMP/MTS. *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, *42*(2).

Jannah, S. (2025). Telaah Nilai Demokrasi dalam Lagu Madura Pajjar Lagghu Melalui Perspektif Budaya Lokal. *Hudan Lin Naas: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *6*(2), 313–332.

Junaidi, K. (2025). Fiqh dan kearifan lokal: studi implementasi nilai-nilai fiqh dalam praktik kehidupan masyarakat tradisional kabupaten kampar. *Sosial Budaya*, *22*(1), 1–9. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/sb.v22i1.37927

Kaseng, E. S. (2025). Community Empowerment Based on Local Potential in UMKM Development. *Journal of Marginal Social Research*, *2*(1), 1–8.

Kayame, Y. (2022). Kearifan Lokal "Noken" Papua bagi Nilai Demokrasi Pancasila di Indonesia. *De Cive*, *2*(12), 1–9.

Kaelan. (2014). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Klerista, T., & Subandi, Y. (2013). Dampak Budaya Patriarki Terhadap Kaum Perempuan Dalam Aspek Politik dan Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *3*(6), 350–357. https://doi.org/https://doi.org/10.60126/jim.v3i6.1016

Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kusno, A. (2000). *The Urban Image of the Global and the Local: Tradition and Modernity in the City of Jakarta*. University of Hawaii Press.

Lahay, R., & Mahmud, R. (2023). Implementasi Sistem Noken Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Papua Dalam Penguatan Nilai Demokrasi. *Jurnal Polahi*, *1*(1).

Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.

Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427. https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188

Lincoln, A. (1863). *Gettysburg Address*.

Matin, H. N. A., Darmawan, C., Bestari, P., & Syaifullah. (2025). Civic Governance dan Good Governance : Dinamika Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah. *Integralistik*, *36*(1), 51–69. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/j473yx66

McIntyre, L. (2018). *Post-truth*. MIT Press.

Morozov, E. (2011). *The net delusion: The dark side of internet freedom*. PublicAffairs.

Mu'jizah, M. (2021). Penguatan Rasa Kebangsaan: Identitas, Demokrasi, dan Kearifan Lokal dalam Undang-Undang Simbur Cahaya. *Manuskripta*, *11*(2), 195–219.

Muhammad A. S. Hikam (2019). Demokrasi Indonesia Antara Asa dan Realita. Afkar Pustaka.

Muhammad Hisyam, Riwanto Tirtosudarmo, M.Bashori Imron, Abdul Rachman Patji, John Haba. (2021). Globalisasi dan Transformasi Sosial dan Budaya. Kompas Penerbit Buku

Muhammad, D. H. (2025). *Peran Kearifan Lokal Dalam Pengambilan Keputusan Pemerintah Desa Sengkerang Kabupaten Lombok Tengah*. Universitas_Muhammadiyah_Mataram.

Muhammad, K., Firdaus, S. U., & Aci, M. H. La. (2023). ebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasiona*, *2*(4), 354–368.

Muminah, S., & Suprajogo, T. (2025). Implementasi Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Pendekatan. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, *8*(4), 1485–1495. https://doi.org/https://doi.org/10.37481/sjr.v8i4.1253

Nababan, K. R. (2023). Mandok Hata sebagai pendidikan demokrasi dalam Kebudayaan Batak. *Jurnal Politik Profetik*, *11*(1), 23–40.

Niemi, R. G., & Junn, J. (1998). *Civic Education: What Makes Students Learn*. Yale University Press.

Noveck, B. S. (2015). *Smart citizens, smarter state: The technologies of expertise and the future of governing*. Harvard University Press.

Novemyanto, A. D. (2026). Tanggung Jawab Negara Atas Hak Atas Udara Bersih Dalam Perspektif Pembangunnan Berkelanjutan. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, *10*(1), 63–72.

Nugroho, Y., Putri, D. A., & Laksmi, S. (2012). *Mapping the landscape of the media industry in contemporary Indonesia*. Centre for Innovation Policy and Governance.

Nur, H. B. M. (2013). Menuju Desentralisasi Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, *19*(1).

Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the internet is hiding from you*. Penguin Press.

Pateman, C. (1970). *Participation and Democratic Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Piswatama, D., & Ivanna, J. (2023). Implementasi Kearifan Lokal Sunda Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Berdemokrasi. *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang*, *5*(2), 232–241.

Postman, N. (1985). *Amusing ourselves to death: Public discourse in the age of show business*. Penguin Books.

Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.

Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.

Ra'is, D. U. (2020). Pembangunan Demokrasasi Desa Berbasis Kearifan Lokal (Kajian dari Sudut Pandang UU Nomor 6 Tahun 2014). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *9*(1), 31–42.

Rafinzar, R. (2021). Deliberative democracy dalam musyawarah rencana pembangunan desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Ramashur, F., & Mulyana, C. A. (2025). Kuatnya Nilai-Nilai Demokrasi dalam Masyarakat Jorong Batunanggai: Studi Pengabdian Masyarakat. *AhkamServe: Journal of Sharia Community Service*, *1*(3), 157–170.

Rahmawati, D. H., Novriza, H., & Dhewantoro, S. (2025). Demokrasi di tengah tantangan kemajemukan bangsa indonesia. *JurnalAplikasi Pendidikan Dan Sosial Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosia*, *2*(2), 75–82. https://doi.org/https://doi.org/10.58466/adidaya.v2i2.1844

Rani, R. (2024). Social interaction patterns of rural communities in preserving local wisdom. *Continuum Journa*

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.

Robertson, R. (1992). *Globalization: Social Theory and Global Culture*. Sage Publications.

Rondinelli, D. A. (1981). Government decentralization in comparative perspective: Theory and practice in developing countries. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133–145.

Ronsumbre, N. (2019). Sistem Noken Papua: Manifestasi Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal. *Sospol*, *5*(2), 261–276.

Rozaki, A. (2015) *Pelembagaan demokrasi melalui musyawarah desa (Musdes)*. Jakarta.

Saptiani, I., Mohamad, A., Agitsna, P. M., Siti, N., & Andi, M. S. (2024). Kearifan lokal dan ketaatan adat: Studi kualitatif tentang kebudayaan dan sistem pemerintahan di Kampung Naga. *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran Dan Ilmu Sosial Учредители: Asosiasi Riset Ilmu Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, *2*(4), 99–108.

Sahrir, R. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menghadapi Tantangan Industri 5.0. *Jurnal Sosial*, *2*(7), 1–15.

Sarumaha1, M., Telaumbanua, K., & Harefa, D. (2024). PENDIDIKAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL NIAS SELATAN : MEMBANGUN IDENTITAS BUDAYA PADA GENERASI MUDA. *Jurnal Pendidikan Dan PembangunanInstitutPendidikan Tapanuli Selatan*, *12*(3), 663–668.

Satria, O. (2025). Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan : Studi Kasus Desa Wisata dan Komunitas Adat. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, *4*(2), 370–376. https://doi.org/https://doi.org/10.55681/seikat.v4i2.1641

Sinamo, N., Nababan, J. P., Sihombing, R., & Hendi, R. (2025). Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, *4*(2), 3306–3320.

Sitompul, H., Louis, A., & Tumeang, B. (2026). Analisis Literatur Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terpencil : Peran Model Desa Wisata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lokal (Refleksi Kasus : Desa Wisata Huta Tinggi , Samosir) Analisis Literatur Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terp. *Journal of Future Social Humanities and Education*, *1*(2025), 41–55.

Sonjaya, Y., Noy, Ismail, Sutisna Entis, Yana, E., & Khotimah Khusnul. (2025). Evaluasi Dampak Pengabdian Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal. *Celebes Journal of Community Services*, *4*(2), 266–284.

Suparmoko, M. (2020). Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Nasional Dan Regional. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, *9*(1), 39–50. https://doi.org/https://doi.org/10.36080/jem.v9i1.1112

Supriatna, E., Nurjaman, K., Sulastri, L., Pikri, F., Sari, L., Islam, U., Sunan, N., Djati, G., & Keluarga, K. (2024). Mengubah Konflik Menjadi Harmoni: Pendekatan Baru dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Indonesia. *Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJHSED)*, *1*(2), 110–130. https://doi.org/https://doi.org/10.54783/pct0tq17

Syafitri, L. D., Putri, S. S., Manumpil, P., Ambarwati, N. H., & Romarina, A. (2025). Mewujudkan Pertumbuhan Yang Merata : Analisis Literatur Ekonomi Pembangunan Indonesia. *Journal Of Education and Developmen*, *4*(4), 2615–2620. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3839

Sejati, S. P., & Hakim, A. B. (2023). Politik Primordial Dan Politik Identitas Dalam Perkembangan Demokrasi Dan Politik Lokal Di Indonesia. *JOSH: Journal of Sharia*, *2*(02), 154–163.

Setiawan, D. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Kearifan Lokal Berwawasan Global*. Medan: Unimed Press.

Shirky, C. (2008). *Here comes everybody: The power of organizing without organizations*. Penguin Press.

Sibarani, R. (2012). *Kearifan Lokal: Hakikat, Peran, dan Metode Tradisi Lisan*. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan.

Smith, A. D. (1991). *National Identity*. University of Nevada Press.

Srijanti, A. Rahman H.I., & Purwanto S.K. (2009). Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi: Mengembangkan Etika Berwarga Negara. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Suacana, I. (2011). Kearifan Lokal tentang Nilai-Nilai Integritas dalam Kehidupan Demokrasi di Bali. , T. (2018). Nilai-nilai kearifan Lokal dalam pandangan hidup masyarakat adat Kampung Kuta. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *3*(1), 19–29.

Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.

Susskind, J. (2018). *Future politics: Living together in a world transformed by tech*. Oxford University Press.

Tapsell, R. (2018). *Media power in Indonesia: Oligarchs, citizens and the digital revolution*. Rowman & Littlefield.

Thesia, R., & Sofyan, A. (2026). Bahasa Politik Lokal: Studi Diksi Legislator Kota Sorong Berbasis Kearifan Lokal. *Journal of State and Public Administration*, *2*(1).

Tilaar, H. A. R. (2002). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Tocqueville, A. de. (1835). *Democracy in America*. New York: Vintage Books.

Torney-Purta, J., et al. (2001). *Citizenship and Education in Twenty-Eight Countries*. Amsterdam: IEA.

Tufekci, Z. (2017). *Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest*. Yale University Press.

Tylor, E. B. (1871). *Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom*. John Murray.

Unayah, N., & Sabarisman, M. (2016). Identifikasi kearifan lokal dalam pemberdayakan komunitas adat terpencil. *Sosio Informa*, *2*(1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: United Nations Development Programme.

UNESCO. (2003). *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. UNESCO.

United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.

Usfunan, J. Z., & Pondayar, Y. (2022). Nilai-nilai kearifan lokal dalam masyarakat adat dalam pemilihan legislatif di Papua. *Japhtn-Han*, *1*(2), 277–289.

Vel, J. A. C., & Bedner, A. (2015). Decentralisation and village governance in Indonesia. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 47*(3), 493–507

Wahyuningsih, C. D. (2019). Nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan daerah. *Jurnal Education*, *3*(7), 1–12.

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Council of Europe.

We Are Social, & Meltwater. (2024). *Digital 2024: Indonesia*. https://wearesocial.com/id/blog/2024/01/digital-2024-indonesia/

Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press.

Wibowo, E. A., & Ardithama, E. (2022). Strategi Pemenangan Pemilihan Kepala Desa Berbasis Kearifan Lokal Madura Perantauan di Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Tahun 2018. *Unnes*

Winataputra, U. S. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Winner, L. (1986). *The whale and the reactor: A search for limits in an age of high technology*. University of Chicago Press.

Yana Suryana, Yudi Suparyanto, Khilya Fa'izia, Wahyu Sri Handayani. (2022). Globalisasi. Cempaka Putih PT

Yusri, N., Wardi, Y., Evanita, S., & Padang, U. N. (2025). Komunikasi dalam Perencanaan Pembangunan : Suatu Kajian Kritis dalam Konteks Kebijakan Lingkungan dan Partisipasi Publik planning , particularly within the framework of participatory and sustainable environmental challenges , and contributions of communic. *Jurnal Salingka Nagari*, *04*(1), 91–104. https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jsn.v4i1.319

Yusuf, M., Syahputra, R. A., Basir, R., Kusuma, W. A., Ganti, B., & Kevin, M. H. S. (2025). Reformasi Perubahan Pidana Menjadi Tuntutan Demokrasu Penegakan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, *8*(2), 485–497. https://doi.org/https://doi.org/10.56301/csj.v8i2.2007

Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. PublicAffairs.

PROFIL PENULIS



DR. MOHAMAD SUTISNA,M.PD

Tentang Saya

"Saya adalah seorang dosen sekaligus praktisi pendidikan yang memiliki komitmen untuk mencetak generasi unggul melalui pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Dengan pengalaman di dunia akademik dan praktik langsung di lapangan, saya berupaya menjembatani teori dengan realita, sehingga ilmu yang diberikan tidak hanya bermakna secara konseptual tetapi juga aplikatif dalam kehidupan."

Pendidikan

SDN SEMPLAK 2 BOGOR TAHUN 1980
SMPN 6 BOGOR TAHUN 1983
SMEA GANESA TAHUN 1986
S1 PKN STKIP ARRAHMANIYAH DEPOK TAHUN 2005
S2 STIM IMNI JAKARTA TAHUN 2008
S3 UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA BANDUNG TAHUN 2012

JABATAN

- **KETUA YAYASAN IBNU SINA BOGOR**
- **Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STKIP Arrahmaniyah Depok**
- **Dosen Pasca Sarjana Prodi PKn STKIP Arrahmaniyah Depok**
- **Dewan Pakar Ikatan Sarjana NU**
- **Pengurus Nasional Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**
- **Pengurus Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI)**
- **Anggota BMPS, PGRI , MKKS Kota Bogor**

HASIL KARYA

Muhamadsutisna290966@gmail.com
0251-7532204
jln Curug Indah Nomor 31 Kota Bogor



Efan Setiadi merupakan seorang akademisi dan tenaga swasta, pernah menjadi Dosen Tetap dan sempat menjadi Kaprodi Hukum di Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) Jakarta, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hukum. Selain mengajar mata kuliah dibidang hukum, penulis juga mengajar mata kuliah umum, khususya Pancasila dan Kewarganegaraan. Bergabung dengan Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) sebagai anggota semenjak berdirinya ADPK. Penulis juga pernah mengajar di Universitas Mercu Buana, Atmajaya, Bhayangkara, Mpu Tantular, BRI Institute, Kwik Gian Gie School of Business dan sampai saat ini masih sebagai DTT di Universitas Dian Nusantara. Selain mengajar, aktivitas lainnya sebagai Farm Manager Perusaahan Kandang Ayam Albahori di Desa Talang Taling, Gelumbang, Palembang - Sumatera Selatan, sejak Juli 2025 (masih aktif) dan terdaftar sebagai Advokat yang tergabung di DPP Lawyers Nusantara, sejak Januari 2026.

Dibesarkan dilingkungan yang sederhana, penulis dilahirkan di Palembang, 12 Desember 1967, memiliki seorang istri, dua putri dan dua putra. Menempuh pendidikan Sarjana Teknik Informatika di Universitas Budi Luhur Jakarta, Sarjana Hukum di Universitas Satyagama Jakarta dan Magister Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta. Pernah mengikuti beberapa kursus dan training diantaranya Training of Trainers Nilai-nilai Kebangsaan di Lemhanas, Workshop di KPK, Pendidikan Khusus Profesi Advokad (PKPA) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kerjasama antara Peradi dan Continuing Legal Education (CLE) Universitas Indonesia. Memiliki Sertifikasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Berstandard Internasional dari National Insight And State Defense Lsp Quantum Hrm Internasional. Penulis juga merupakan lulusan terbaik saat mendapatkan gelar Magister Hukum.



Ramadhan Dwi Prasetyo, M.Sc

Ramadhan Dwi Prasetyo adalah dosen Pancasila dan Kewarganegaraan di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ). Ia merupakan alumni Magister (S2) Program Studi Ketahanan Nasional, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2019. Memiliki minat riset pada bidang demokrasi, kebijakan publik, dan transportasi, dengan fokus pada isu tata kelola, partisipasi publik, serta integrasi nilai-nilai kebangsaan dalam kebijakan sektor transportasi.



Sanusi lahir di Tanjung Ara, Aceh Utara pada tahun 1973. Ia lulus dengan gelar Sarjana pada tahun 1997 dari Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Keilmuan, Universitas Syiah Kuala. Tahun 1998, dipromosikan menjadi dosen junior di jurusan tersebut. Meraih gelar Magister pada tahun 2001 dari Universitas Brawijaya, Malang, dengan jurusan Ilmu Administrasi. Menyelesaikan Program Doktor di Universitas Merdeka Malang, Jawa Timur, dengan jurusan Ilmu Sosial pada tahun 2014. Setelah menjabat sebagai Sekretaris Unit MKU selama dua tahun dari 2015-2017, kemudian pada tahun 2015-2020 diangkat sebagai ketua Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan. Saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik di Fakultas Keguruan dan Ilmu Keilmuan (FKIP), Universitas Syiah Kuala. Dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, berfokus pada bidang sosiologi dan pendidikan kewarganegaraan. Kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya diarahkan untuk membentuk peserta didik yang berkarakter Pancasila, berpikir kritis, memiliki kepekaan terhadap dinamika sosial, serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, juga aktif dalam berbagai forum ilmiah, publikasi akademik, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan saat ini.



Dr. Wachid Pratomo, S.Pd., M.Pd. merupakan dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar serta Pascasarjana Pendidikan Dasar, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya (S1) di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Sebelas Maret (UNS) pada tahun 2009. Gelar Magister Pendidikan (S2) bidang Pendidikan Kewarganegaraan diraih dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) pada tahun 2014, sedang gelar doktor (S3) diperolehnya dari Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) pada tahun 2025. Dalam bidang akademik dan profesi, Wachid Pratomo aktif menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan dan forum yang mengangkat isu-isu karakter, kepramukaan, anti korupsi, pendidikan multikultural, bela negara, serta penguatan nilai-nilai Pancasila. Keahlian utamanya meliputi Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Kepramukaan, Multikulturalisme,

Nasionalisme, dan Pendidikan Karakter Bangsa. Ia juga produktif dalam menulis dan menerbitkan buku serta modul pembelajaran, baik secara internal di lingkungan UST maupun melalui penerbit nasional yang terakreditasi. Beberapa karya yang telah diterbitkan antara lain Pendidikan Anti Korupsi (2016), Pendidikan Multikultural (2020), Kepramukaan (2023), Pendidikan Pancasila (2021), Pendidikan Pancasila SD (2024), Pendidikan Kewarganegaraan (2023), Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar (2023), Pengantar Pembelajaran PKn (2025), serta buku N4DI (2025). Selain menulis buku, ia juga aktif meneliti dan mempublikasikan artikel ilmiah di berbagai Jurnal Internasional terindeks Scopus serta jurnal nasional terakreditasi SINTA 2, SINTA 3, SINTA 4, dan SINTA 5. Selain itu Wachid Pratomo merupakan penilai Buku Teks Pendamping dari Pusbuk Nasional tahun 2025. Keterlibatannya dalam penulisan artikel ilmiah, book chapter, dan bunga rampai dengan ISBN turut menunjukkan komitmennya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Pendidikan Kewarganegaraan dan karakter bangsa.



Prof. Susi Fitria Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D., lahir di Bukittinggi pada tanggal 16 September 1977. Sejak tahun 2005 mengabdi pada Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada program sarjana, mengampu mata kuliah Resolusi Konflik, Sosiologi Politik, Sosiologi Gender, Pengantar Sosiologi, serta Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal. Sementara pada program magister, ia mengajar mata kuliah Analisis Kebangsaan dan Teori Pembangunan, serta Studi Lapangan dan Seminar PPKn. Prof. Susi juga aktif melakukan penelitian dan publikasi ilmiah yang berfokus pada konflik sosial, relasi negara dan masyarakat, serta dinamika masyarakat adat. Karya-karya ilmiahnya terdokumentasi dalam berbagai basis data akademik nasional dan internasional seperti Scopus, ORCID, dan SINTA.

DEMOKRASI PANCASILA

BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Pendidikan, Transformasi Digital, Tantangan, dan Strategi Penguatan

Buku ini membahas demokrasi Pancasila sebagai sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme pemilihan pemimpin dan pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai upaya membangun kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan, toleransi, musyawarah, serta penghormatan terhadap keberagaman. Dalam konteks Indonesia, kearifan lokal memiliki peran penting dalam memperkuat praktik demokrasi karena mengandung nilai-nilai budaya yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Buku ini menguraikan berbagai aspek demokrasi Pancasila, mulai dari landasan filosofis, prinsip-prinsip demokrasi, hubungan Pancasila dengan kearifan lokal, hingga peran pendidikan dalam membentuk kesadaran dan budaya demokratis. Pembahasan juga mencakup transformasi digital yang membawa perubahan terhadap pola komunikasi, penyebaran informasi, partisipasi politik, dan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Di samping peluang yang ditawarkan teknologi digital, terdapat berbagai tantangan yang perlu diperhatikan, seperti penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, polarisasi sosial, rendahnya literasi digital, serta melemahnya nilai-nilai kebangsaan.

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

SCANME

Pendidikan & Metodelogi Penelitian

ISBN 978-634-317-540-7

9 786343 175407